



Korupsi dan Kesetaraan Gender

Oleh : Laili Zailani

HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia)

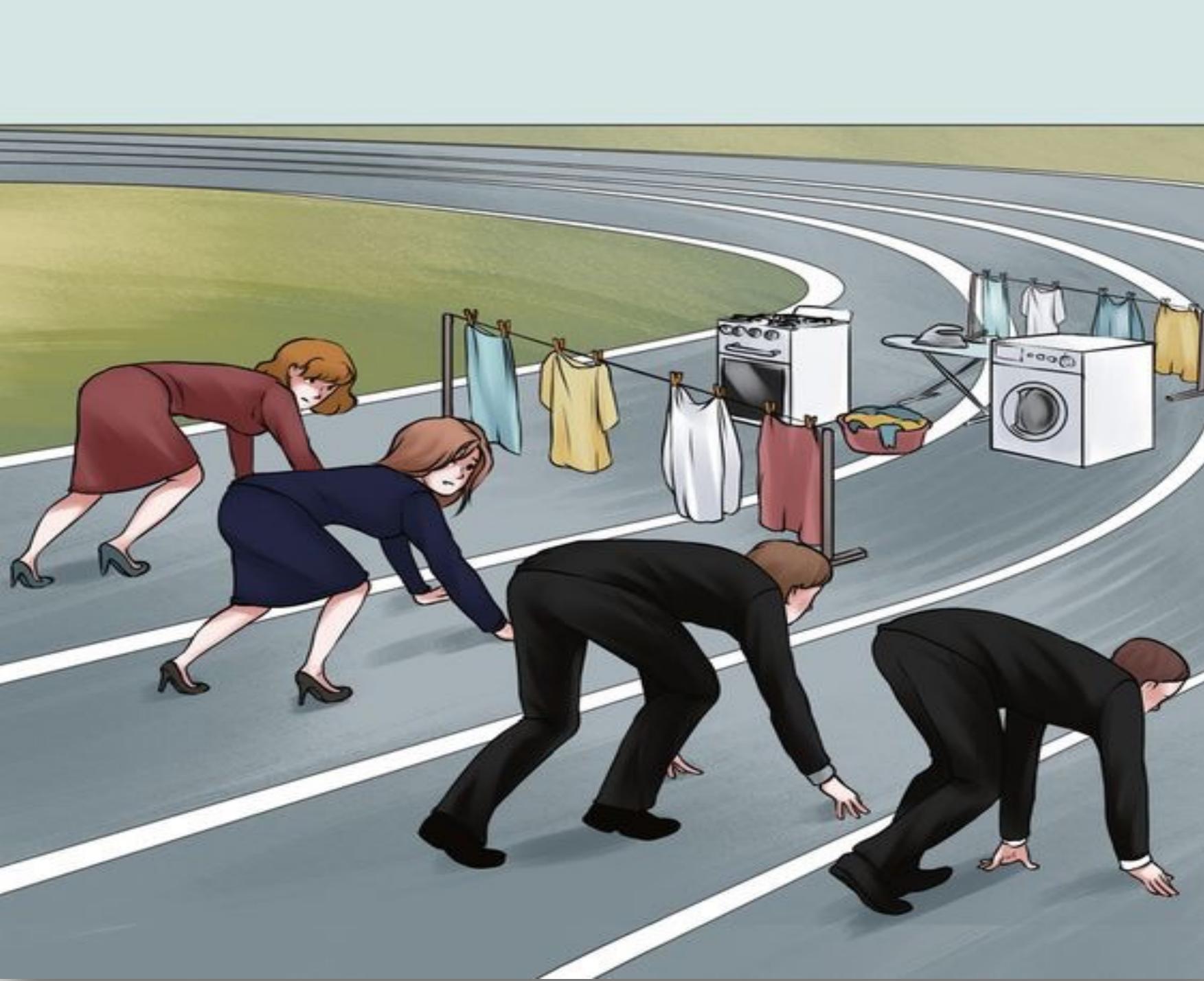
Untuk Bahan Diskusi :
Sekolah Pengawasan dan Pemantauan Pengadaan Publik (SP3)
03 Agustus 2021



introduction

Ketidakadilan gender :

- Pola hubungan yang tidak adil atau diskriminatif atas dasar jenis kelamin.
- Peran gender dibedakan dari peran biologis, tetapi keduanya seringkali berkait berkelindan.
- Peran biologis perempuan untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, menyusui) : “mendorong dan memaksa” perempuan melakukan peran gender untuk bertanggungjawab dalam pengasuhan anak dan pengurusan rumah tangga → bertanggungjawab di ranah domestik.
- Laki-laki lebih bertanggungjawab atas pekerjaan yang bersifat publik → pekerjaan ekonomi maupun politik dengan penghargaan sosial dan material yang umumnya lebih besar dibanding kerja-kerja domestik perempuan.
- Peran gender ini lah yang sangat mempengaruhi pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima manfaat, akses terhadap informasi, dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki.



introduction

Apa pendapat Anda melihat ilustrasi gambar ini?

- Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama.**
- Perempuan belum memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki.**
- Perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama tapi tantangannya berbeda.**

Korupsi dan Ketidakadilan Gender (1)

Korupsi → penyalahgunaan wewenang/kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Ketidakadilan gender telah memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki dalam kasus korupsi.

- ❑ Perempuan menjadi korban (langsung) yang menanggung beban sangat berat dari dampak korupsi;
- ❑ Semakin menjauhkan perempuan dari akses atas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta meninggalkan perempuan jauh di belakang dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- ❑ Perempuan (istri) sering dijadikan rasionalisasi perbuatan korupsi, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan laki-laki melakukan korupsi (tuntutan ketamakan istri), dll.
- ❑ Perempuan lebih rentan menjadi korban maupun pelaku korupsi sehari-hari terkait dengan peran gendernya yang menuntut mereka untuk lebih sering berinteraksi dengan sektor penyedia layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
 - ❑ Korupsi yang terjadi di tingkatan implementasi program/kebijakan saat masyarakat bertemu langsung dengan pegawai negara dan seringkali berwujud penyuapan.

- ❑ Dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, perempuan bahkan rentan menjadi korban pemerasan seksual (*sexual extortion*).
 - Contohnya; pemerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ketika mahasiswi dipaksa untuk berhubungan seks agar mendapatkan nilai yang bagus.
 - Atau pemerasan seksual oleh atasan terhadap bawahannya untuk jabatan atau kenaikan gaji, dll.

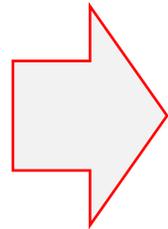
Korupsi dan Kerugian Negara :

Tahun 2019 = 271 kasus korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum.

- 64,2% merupakan korupsi PBJ
- Kerugian Negara sebesar Rp 957,3 milyar suap Rp 91,5 miliar.

PBJ Pemerintah merupakan bagian yang paling banyak dijangkiti korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyakit ini sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan publik dan berkurangnya jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat.

- Korupsi Insfrastruktur**
 - kualitas jalan yang buruk.
 - stagnasi ekonomi.
- Korupsi sektor Kesehatan**
 - Kualitas layanan kesehatan yang buruk.
- Korupsi sektor Pendidikan**
 - Fasilitas pendidikan yang buruk,
 - Menurunnya kualitas pendidikan.



- tekanan berlipat-ganda;
- kualitas layanan sosial berkurang;
- kemiskinan;
- resiko kesehatan yang buruk (kematian ibu dan bayi) biaya mahal;
- membayar pungli (sumbangan biaya pendidikan, buku, guru honorer, hadiah, dll);
- pemerasan seksual.

Kerugian Perempuan? Dalam konteks ketidakadilan gender



Korupsi dan Ketidakadilan Gender (2)

Sanksi Ganda

Sanksi Hukum dan Pelabelan :

- Ketidakadilan gender juga memunculkan sanksi ganda bagi perempuan yang terlibat kasus korupsi.
- Perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan penyimpangan, termasuk menjadi pelaku tindak korupsi.

Pemberitaan Bias Gender

- Pemberitaan media seringkali bias gender terhadap perempuan pelaku tindak korupsi maupun perempuan terlibat korupsi.
- Kehidupan pribadi dan gaya hidup pelaku akan menjadi bahasan utama dibandingkan tindakan korupsi itu sendiri.

Partisipasi Memerangi Korupsi

- Perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk dapat berpartisipasi dalam memerangi korupsi.
- Pengetahuan yang rendah terkait korupsi dan proses hukum juga menjadi hambatan bagi perempuan;
 - Bagaimana memantau perilaku korupsi;
 - Bagaimana dan kemana melaporkan?

Mengakhiri Ketidakadilan Gender dan Melakukan Pemberdayaan Perempuan



Korupsi dan Kesetaraan Gender

- ❑ Korupsi tidak hanya mendudukan perempuan sebagai objek yang dirugikan, melainkan juga sebagai subjek yang mungkin melakukan (baca : korupsi dan kekuasaan)
- ❑ Hakikat dari kesetaraan gender adalah memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya, serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

Membangun Prinsip dan Nilai-nilai Kesetaraan Gender :

- ❑ Meningkatkan pengetahuan dan menghidupkan nilai-nilai adil gender dalam diri perempuan, laki-laki dan masyarakat;
- ❑ Memberdayakan perempuan;
- ❑ Memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya, serta dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

Peran Strategis Perempuan :

- ❑ Perempuan dapat memberi pengaruh positif dengan menumbuhkan sikap antikorupsi dan menciptakan sistem antikorupsi sejak dalam lingkup domestik.
 - ❑ agen agen perubahan untuk menyuarakan anti korupsi;



PBJ dan Analisis Pengarus Utamaan Gender

- ❑ Memastikan PBJ untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara.



Terimakasih

